



MEMBANGUN LINGKUNGAN RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI OPTIMALISASI FUNGSI KETAHANAN KELUARGA DI DESA TEGALYOSO, KLATEN SELATAN

Muhammad Asyrofudin^{1*}, Najwa Salsabila Putri Ritma², Wahyu Adi Prasetyo³, Ardhiana Syifa Miftahul Jannah⁴, Intan Syainia Ranita Putri⁵, Lesti Widiyawati⁶, Toni Dwi Novianto⁷, Isnaini Usfahatun Khasanah⁸, Erika Febriyanti⁹, Isnainis Sofaroh¹⁰, Luthfinnuha Ihyia Ulumuddiin¹¹, Agripina Zahra Ashilah Putri¹², Hasanatul Jannah¹³

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta

¹⁰Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan

*E-mail: asyrof0510muhammad@gmail.com

ABSTRAK

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Secara sosiologis, Desa Tegalyoso menghadapi tantangan struktural dan kultural berupa pembagian peran domestik yang timpang, kerentanan perempuan di sektor informal, serta masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kerap dianggap sebagai aib keluarga. Menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), pelaksanaan program ini dibagi ke dalam tiga tahapan utama: pemetaan sosial, sosialisasi edukatif terkait literasi digital dan pencegahan KDRT, serta pendampingan intensif bagi kelompok perempuan dan keluarga. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kesadaran kritis masyarakat, tumbuhnya inisiatif pembagian tugas domestik yang lebih adil, serta terbentuknya forum komunikasi warga sebagai ruang deteksi dini dan mitigasi konflik keluarga. Secara konklusif, upaya membangun lingkungan desa yang berkeadilan gender menuntut adanya dekonstruksi budaya patriarki melalui penguatan ketahanan keluarga, komunikasi dialogis, dan penerapan prinsip relasi kesalingan.

Kata kunci: Desa ramah perempuan dan peduli anak, ketahanan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BUILDING A WOMEN- AND CHILD-FRIENDLY ENVIRONMENT THROUGH THE OPTIMIZATION OF FAMILY RESILIENCE IN TEGALYOSO VILLAGE, SOUTH KLATEN

ABSTRACT

This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat) aims to promote the realization of a Women-Friendly and Child-Care Village (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) in Tegalyoso Village, Klaten Selatan, Klaten. Sociologically, Tegalyoso faces structural and cultural challenges, including unequal domestic role distribution, the vulnerability of women in the informal sector, and limited community understanding of Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), which is often stigmatized as a private family disgrace. Utilizing a Participatory Action Research (PAR) approach, the program was executed in three main stages: social mapping, educational workshops on digital literacy and domestic violence prevention, and intensive mentoring for women's groups and families. The results demonstrate an increase in critical awareness among the community, the emergence of initiatives for more equitable domestic role sharing, and the establishment of a community communication forum as a space for early detection and mitigation of family conflicts. Conclusively, efforts to build a gender-just village environment require the deconstruction of patriarchal culture through the strengthening of family resilience, dialogical communication, and the implementation of the principle of reciprocity.

Keywords: Women-friendly and child-care village, family resilience, domestic violence (KDRT).

PENDAHULUAN

Membangun lingkungan yang ramah perempuan dan anak, menjadi salah satu misi dari visi besar kehidupan sosial yang adil dan beradab. Sebab selama perempuan masih dianggap sebagai pihak yang lebih rendah dibanding laki-laki, maka baik keluarga maupun negara tidak akan pernah memperoleh derajat yang tinggi (Bistara, 2020). Di sisi lain, tingkah laku seorang anak dalam lingkungan sosial,



juga bergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orangtua di lingkungan rumahnya, terutama seorang ibu. Dalam ungkapan populer *“akses pendidikan anak adalah ibu, jika seorang ibu telah mempersiapkan dirinya, maka seraya ia juga dipersiapkan untuk anak-anak bangsa”* (Tim Forum Kajian Ilmiah Fikrah, 2024).

Namun demikian, realisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) secara optimal tidak bisa dilakukan tanpa adanya regulasi dari pemerintah, aktor penegak hukum, dan partisipasi dari masyarakat lokal. Secara regulasi, pemerintah republik Indonesia telah melakukan langkah progresif dalam membangun DRPPA dalam ruang lingkup domestik. Hal ini terlihat pada fakta diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban, menindak pelaku, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis (Indonesia, 2004). Demikian juga secara struktural, upaya mewujudkan lingkungan yang ramah perempuan dan anak di Indonesia juga dapat dilihat dari langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam menginisiasi model DRPPA yang bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Putra, 2025).

Meski secara substansi dan struktural sudah cukup memadai, akan tetapi sikap dan nilai-nilai dari masyarakat yang menjadi objek pembangunan DRPPA juga perlu untuk diperhatikan secara seksama. Karena sikap dan nilai-nilai tersebut, turut berpengaruh pada perilaku masyarakat yang akan memanfaatkan pengadilan atau tidak dalam berbagai kasus yang terjadi di ranah domestik (Yudho & Tjadasari, 2026). Sehingga dalam dimensi kultural ini, perlu adanya program yang terarah secara konsisten untuk membentuk suasana sosial yang kondusif. Dalam mewujudkan hal ini, setidaknya dipengaruhi oleh salah satu proses yang disebut dengan sosialisasi, yaitu pengajaran atau pendidikan, baik secara formal atau informal, yang berfungsi untuk memasukkan norma-norma (kaidah hukum) yang ada ke dalam kepribadian masyarakat (Yudho & Tjadasari, 2026).

Proses sosialisasi semakin menjadi penting, manakala laporan CATAHU (Catatan Tahunan) yang diutarakan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2025, merilis kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia yang berakar kuat pada ketimpangan relasi kuasa. Pasalnya, telah terjadi peningkatan kasus KBGtP di sepanjang tahun 2025 dengan angka sebesar 376.529. Laporan ini meningkat 14.07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ironisnya, kasus KBGtP yang terjadi di ranah personal menduduki angka yang paling dominan dengan jumlah 337.961 kasus atau 89,76% dari total kasus keseluruhan. Sementara kasus yang terjadi di ranah publik 17,252 kasus dan ranah negara 2.707 kasus. Adapun karakteristik korban berkisar dari usia 18 sampai 24 tahun dan 25 sampai 40 tahun. Dengan adanya laporan ini, lingkungan keluarga, relasi perkawinan, dan relasi intim, meskipun sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), ternyata di dalamnya masih menjadi ruang yang rentan bagi perempuan (Perempuan, 2026).

Data terkait kekerasan yang mencakup wilayah kabupaten/provinsi juga turut memprihatinkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh DP3AKB Provinsi Jawa Tengah hingga September 2025, tren kekerasan yang menimpa pihak perempuan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 802 kasus. Angka tertinggi didominasi oleh Kota Semarang dengan 135 kasus serta Kabupaten Sukoharjo dengan 49 kasus, sedangkan wilayah seperti Boyolali 19 kasus dan Klaten 22 kasus. Dua wilayah yang disebutkan terakhir, tercatat dengan angka yang relatif rendah.

Adapun kasus kekerasan terhadap anak, berdasarkan sebaran kasus dalam lingkup kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (September 2025), memetakan angka kumulatif kasus kekerasan anak dengan jumlah 1.214 kasus. Angka tertinggi juga tercatat di Kota Semarang dengan 145 kasus dan Cilacap 113 kasus. Sementara kabupaten dengan angka terendah meliputi Kudus, Jepara, dan Demak. Dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di kabupaten Klaten mencapai 41 kasus (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 2025).

Fakta terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik secara makro (negara) atau mikro (provinsi/kabupaten/kota), semakin menegaskan asumsi bahwa kesenjangan gender yang terjadi dapat menyebabkan perempuan menjadi pasif. Lebih dari itu, ia juga dapat menimbulkan ketidakadilan berbasis gender, seperti subordinasi, diskriminasi, bahkan tindakan kekerasan (Ekawati, Priyanto, & Agustina, 2024).



Di Desa Tegalyoso sendiri, potret kondisi sosial-masyarakat menunjukkan adanya tantangan serius terkait ketahanan keluarga, yang teridentifikasi melalui permasalahan mitra seperti masih kuatnya pembagian peran domestik yang timpang, yang mana secara administratif terdapat 422 perempuan di Desa Tegalyoso memiliki pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga. Sementara jumlah laki-laki yang memiliki pekerjaan mengurus rumah tangga di Desa Tegalyoso tidak ada sama sekali (Tegalyoso, 2026a).

Tentu saja, hal ini mengimplikasikan terbatasnya ruang aktualisasi dan akses publik bagi perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Di samping itu, potensi kerentanan terhadap tindak KGBtP di Desa Tegalyoso juga terlihat pada angka perempuan sebanyak 256 yang bekerja sebagai buruh harian lepas (Tegalyoso, 2026a). Fakta ini, meskipun mereka memiliki mobilitas fisik keluar rumah untuk bekerja, jenis pekerjaan ini umumnya memiliki kerentanan tinggi terhadap eksploitasi, ketidakpastian upah, dan minimnya jaminan sosial, sehingga ruang gerak ekonomi mereka bersifat terpaksa alih-alih sebagai bentuk pemberdayaan yang otonom. Di samping itu, tingginya perempuan yang menduduki pekerjaan di sektor informal juga dapat mengimplikasikan kurang optimalnya komunikasi dan pendidikan anak di lingkungan rumah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui program sosialisasi dan pendampingan yang terfokus pada tema pemberdayaan perempuan dan anak. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat Desa Tegalyoso agar mampu mengenali potensi kerentanan, mengubah pola asuh yang responsif gender, serta membangun sistem perlindungan berbasis komunitas yang berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan desa yang ramah perempuan dan anak.

METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penempatan lokasi pengabdian ini didasarkan pada kebijakan dari pihak universitas. Kendati demikian, berdasarkan hasil pemetaan sosial awal yang dilakukan di lapangan, Desa Tegalyoso teridentifikasi memiliki urgensi dan tantangan struktural dan kultural yang sangat relevan dengan fokus pengabdian. Tantangan tersebut meliputi perlunya penguatan ketahanan keluarga, pembagian peran dalam ranah domestik yang belum sepenuhnya seimbang, serta pentingnya peningkatan perlindungan bagi perempuan yang beraktivitas di sektor informal. Partisipan dalam program ini mencakup perangkat desa, tokoh masyarakat, serta kelompok perempuan dan keluarga di Desa Tegalyoso.

Pelaksanaan pengabdian ini dirancang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) atau riset aksi partisipatif. Pendekatan ini menekankan pelibatan aktif masyarakat secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selanjutnya, setelah melakukan pemetaan potensi masyarakat desa, kerangka kerja ini juga mengintegrasikan dua pilar utama intervensi, yakni Sosialisasi dan Pendampingan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kemandirian serta kepercayaan diri masyarakat dalam membangun sistem perlindungan sosial. Secara rinci, tahapan kegiatan dilaksanakan melalui tiga fase utama sebagai berikut: Pertama, Tahap Persiapan dan Pemetaan Sosial. Tahap ini dilaksanakan sebagai asesmen awal sebelum intervensi utama digulirkan. Kegiatannya meliputi observasi lapangan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan sosial, rapat koordinasi kolaboratif dengan perangkat Desa Tegalyoso, serta pemetaan sosiologis terkait pembagian peran dalam rumah tangga. Data empiris yang diperoleh menjadi landasan strategis untuk merumuskan pendekatan yang paling adaptif terhadap budaya masyarakat setempat.

Kedua, Sosialisasi dan Edukasi. Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat mengenai hak-hak perempuan, pentingnya pola pengasuhan yang komunikatif, serta upaya preventif terhadap faktor dan perilaku kekerasan berbasis gender. Sesi ini disampaikan melalui metode interaktif dan dialogis, guna memperkenalkan indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan menegaskan signifikansi dari ketahanan keluarga.

Ketiga, Pendampingan dan Penguatan Kapasitas. Melampaui edukasi teoretis, tahap ini menitikberatkan pada pelibatan masyarakat secara praktikal. Kelompok perempuan dan keluarga diberikan pendampingan untuk mengenali serta memitigasi kerentanan yang mereka hadapi, baik di



ruang domestik maupun publik. Masyarakat didorong untuk mempraktikkan langsung resolusi konflik keluarga yang sehat dan berkeadilan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan awal ketahanan keluarga di Desa Tegalyoso memperlihatkan perpaduan antara potensi demografis yang cukup kuat dan persoalan relasi keluarga yang masih memerlukan perhatian. Data administrasi desa tahun 2026 mencatat jumlah penduduk sebanyak 3.456 penduduk, sebanyak 2.463 jiwa atau 71,27% berada pada kelompok usia 15-64 tahun. Kelompok usia 0-14 tahun berjumlah 615 jiwa atau 17,80%, sedangkan penduduk berusia 65 tahun ke atas berjumlah 378 jiwa atau 10,94% (Tegalyoso, 2026c).

Berdasarkan proporsi penduduk usia produktif yang cukup besar, Desa Tegalyoso menunjukkan tersedianya basis sumber daya manusia yang dapat mendukung aktivitas sosial masyarakat. Berdasarkan kerangka *Sustainable Livelihoods*, ketersediaan sumber daya manusia yang besar ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga mencakup akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas adaptif. Seluruh elemen tersebut menjadi fondasi krusial bagi anggota rumah tangga dalam mengelola berbagai sumber penghidupan, menavigasi kerentanan sosial, serta memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan berkelanjutan (Natarajan, Newsham, Rigg, & Suhardiman, 2022).

Potensi sumber daya manusia juga terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat. Data resmi yang dirilis oleh Pemerintah Desa Tegalyoso tahun 2026 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk yang tamat SLTA berjumlah 1.105 orang atau 31,97%, sedangkan 709 orang atau 20,52% telah menyelesaikan pendidikan diploma hingga pascasarjana. Pada kelompok pendidikan tinggi, perempuan berjumlah 376 orang atau 21,19% dari seluruh penduduk perempuan. Jumlah tersebut sedikit lebih tinggi daripada laki-laki yang mencapai 333 orang atau 19,80% dari seluruh penduduk laki-laki (Tegalyoso, 2026b).

Komposisi tersebut, sebenarnya telah menunjukkan bahwa perempuan di Desa Tegalyoso memiliki modal pendidikan yang memadai untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, pengasuhan, pengambilan keputusan keluarga, dan organisasi masyarakat. Namun pemanfaatan modal pendidikan itu masih menghadapi tantangannya dalam bentuk budaya ketidaksetaraan peran keluarga dan ruang partisipasi yang tersedia di lingkungan desa. Sebab secara dominan, pekerjaan perempuan di Desa Tegalyoso dengan jumlah 422 perempuan yang hanya bekerja di sektor domestik. Sementara jumlah laki-laki yang memiliki pekerjaan mengurus rumah tangga di Desa Tegalyoso sama sekali tidak ada (Tegalyoso, 2026a).

Di sisi lain, masyarakat Desa Tegalyoso yang bekerja di sektor informal juga lebih dominan dibanding dengan pekerjaan formal yang lebih aman dari kerentanan. Secara lebih rinci, masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian lepas sebesar 697 orang dengan kriteria pekerja perempuan sejumlah 256 orang. Adapun masyarakat yang bekerja menjadi karyawan swasta sebanyak 465 orang, wiraswasta 156 orang, sementara aparatur sipil negara hanya 123 orang (Tegalyoso, 2026a). Dengan demikian, masyarakat perempuan Desa Tegalyoso yang bekerja di sektor informal masih berada di posisi yang rentan terhadap eksploitasi, ketidakpastian upah, dan minimnya jaminan sosial, sehingga ruang gerak ekonomi mereka pun masih bersifat terpaksa alih-alih sebagai bentuk pemberdayaan yang otonom.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh tim pengabdian dengan Ibu Heny Wijayanti, selaku Ibu RW 09 Desa Tegalyoso, telah memperkuat pembacaan tersebut. Pasalnya, narasumber menilai bahwa pekerjaan domestik masih lebih banyak ditangani perempuan. Sementara keterlibatan suami masih dinilai sangat terbatas dan umumnya berupa mengantar atau menjemput anak ketika sedang libur kerja (Wawancara Pribadi, 12 Juli 2026). Hal ini, tentu saja berimplikasi pada terbatasnya waktu, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial perempuan.

Dalam pemahaman masyarakat mengenai kekerasan berbasis gender, Ibu Heny Wijayanti, juga mengutarakan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tegalyoso masih sangat minim dalam memahami gejala kekerasan berbasis gender karena kurangnya sosialisasi. Bahkan dalam kasus seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih dianggap sebagai aib keluarga yang kemudian menimbulkan gejala *broken home*, luka batin yang disusul sakit fisik, dan bahkan dalam beberapa kasus ada yang sampai meninggal dunia (Wawancara Pribadi, 12 Juli 2026).



Dengan hasil pemetaan kondisi dan ketahanan keluarga demikian, Desa Tegalyoso memiliki modal demografis, pendidikan, pekerjaan, dan kelembagaan sosial yang sudah cukup kuat. Akan tetapi, aset tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi ketahanan keluarga yang responsif gender. Pembagian pekerjaan domestik yang belum setara dan rendahnya pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai posisi keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Kegiatan pengabdian melakukan upaya penguatan peran keluarga melalui proses sosialisasi, baik secara kolektif dengan mengumpulkan seluruh masyarakat dalam satu tempat atau terpisah-pisah yang disampaikan melalui kegiatan pertemuan ibu-ibu PKK.

Dalam pelaksanaan sosialisasi kolektif, tim pengabdian menjalin sinergi kolaboratif dengan berbagai organisasi mitra. *Solidarity Against and Respect for All* (SAVARA) berperan aktif dalam mendampingi tim pengabdian selama penyampaian materi, khususnya dalam membedah prosedur pelaporan kasus kekerasan agar tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu oleh warga. Sementara itu, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memberikan penguatan perspektif keagamaan yang responsif gender, dan juga berperan sebagai kanal diseminasi dengan mendokumentasikan serta mempublikasikan seluruh rangkaian kegiatan pengabdian melalui website resmi mereka. Adapun keterlibatan LAZISNU Klaten dan Karangtaruna Desa Tegalyoso melengkapi dukungan logistik dan mobilisasi massa, sehingga isu DRPPA dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Tema sosialisasi yang diangkat adalah "*Optimalisasi Desa Ramah Perempuan dan Anak melalui Penguatan Peran Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tegalyoso.*" Tujuan utama dari kegiatan ini agar masyarakat Desa Tegalyoso menjadi semakin paham terkait pola pengasuhan yang setara, pembagian tanggung jawab rumah tangga secara proporsional, serta komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antaranggota keluarga.

Pemilihan keluarga sebagai objek penguatan didasarkan pada kenyataan bahwa penerapan prinsip DRPPA tidak hanya berkait-kelindan dengan keberadaan program atau kelembagaan di tingkat desa. Akan tetapi, penerapannya juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlangsung di dalam rumah tangga. Pembagian pekerjaan rumah, keterlibatan ayah dan ibu dalam pengasuhan, cara orang tua memperlakukan anak laki-laki dan perempuan, serta pola komunikasi dalam keluarga juga merupakan bentuk sederhana yang dapat menentukan terciptanya hubungan yang seimbang. Di sisi lain, mengangkat dimensi penguatan keluarga sebagai tema sosialisasi, juga selaras dengan prinsip Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai unsur penting dalam perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Dalam praktik keseharian, pembagian pekerjaan rumah tangga, keterlibatan ayah dan ibu dalam pengasuhan, serta cara orang tua memperlakukan anak laki-laki dan perempuan juga merupakan indikator sederhana terciptanya hubungan yang seimbang. Untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya menyentuh isu gender secara teoretis, tetapi menghubungkannya dengan aktivitas konkret seperti pendampingan pendidikan dan pengambilan keputusan keluarga.

Lebih jauh, efektivitas dari pola asuh responsif gender ini sangat bergantung pada kualitas komunikasi antaranggota keluarga. Sebagaimana yang diutarakan oleh Dra. Sukarsini, selaku narasumber dalam kegiatan sosialisasi, dengan mengutip ungkapan psikoterapis Virginia Satir bahwa "*komunikasi ibarat napas dalam sebuah relasi, maka tanpa komunikasi yang efektif dan terbuka, sebuah hubungan keluarga akan sulit untuk berkembang secara sehat.*" (Redaksi Kupipedia, "Sinergi KKN UIN Surakarta Dorong Desa Ramah Perempuan dan Anak di Klaten," Kupi.or.id, 2026, <https://kupi.or.id/artikel/berita/sinergi-kkn-uin-surakarta-dorong-desa-ramah-perempuan-dan-anak-di-klaaten>).

Hasil dari kegiatan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat berhasil menjadi katalisator untuk mengoptimalkan peran keluarga agar lebih adaptif dan solutif dalam menjalankan komunikasi dalam rumah tangga. Hal tersebut terlihat dari interaksi aktif yang terjadi di kegiatan sosialisasi yang menunjukkan adanya keinginan dari sebagian peserta sosialisasi untuk merubah cara komunikasi



pengasuhan lama yang satu arah menuju pola pengasuhan yang dialogis dan komunaktif sebagaimana yang ditekankan Ibu Sukarsini selaku narasumber dalam kegiatan sosialisasi.

Sementara sosialisasi yang sifatnya terpisah, di dalamnya dilakukan juga pendampingan secara intensif bersama kelompok ibu-ibu PKK melalui tiga pertemuan berkala. Fokus pendampingan tidak lagi bersifat teoretis, melainkan menasar pada perubahan praktik keseharian. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat menjadi fasilitator dan katalisator dalam penyampaian materi dan perubahan cara pandang dalam segala hal yang berkaitan erat dengan tema pemberdayaan perempuan dan ketahanan fungsi keluarga. Secara lebih konkret, materi sosialisasi mengangkat tema: (1) Mengenal Hoaks dan Penipuan; (2) Mengenal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); (3) dan Pentingnya Komunikasi Keluarga.

Sebagai upaya memperkuat kapasitas perempuan dalam menghadapi perkembangan informasi digital, pertama-tama tim pengabdian kepada masyarakat mengangkat tema sosialisasi "*Mengenal Hoaks dan Penipuan*" kepada ibu-ibu PKK Desa Tegalyoso. Kegiatan ini menjadi bagian dari pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menerima, menilai, serta menggunakan informasi secara bijak (Lestari & Widarini, 2019). Kemampuan tersebut dibutuhkan karena perempuan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan dalam menyampaikan informasi kepada anggota keluarga dan lingkungan sosialnya.

Dengan membekali peserta terkait kemajuan teknologi informasi digital, diharapkan peserta dapat memahami bahwa informasi palsu dan penipuan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memicu kecemasan, kesalahan dalam mengambil keputusan, perselisihan antar anggota keluarga, dan menurunnya rasa saling percaya. Kebiasaan memeriksa sumber, mendiskusikan informasi, serta tidak terburu-buru meneruskan pesan dapat membangun pola komunikasi keluarga yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keluarga pun menjadi lebih siap menghadapi perubahan dan risiko yang muncul dari penggunaan teknologi digital.

Di sisi lain, dengan pemahaman yang memadai ihwal kemajuan teknologi dan informasi, peserta juga dapat menjadi perisai keluarga dari kejahatan dunia digital. Dalam hal ini, perempuan dapat menjadi penggerak literasi digital di lingkungan terdekatnya. Peran tersebut bukan berarti menempatkan seluruh tanggung jawab perlindungan keluarga kepada ibu, melainkan mendorong keterlibatan seluruh anggota keluarga untuk saling mengingatkan, memeriksa kebenaran informasi, dan menjaga keamanan data pribadi. Pengetahuan yang diperoleh peserta juga dapat disebarkan kembali kepada pasangan, anak, kerabat, dan masyarakat sekitar.

Selain menyampaikan perihal hoaks dan berita palsu, sebagai upaya pemberdayaan perempuan, tim pengabdian kepada masyarakat juga menyampaikan materi seputar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mulai dari sebab terjadinya, ciri-cirinya, hingga cara menanganinya. Penyampaian materi ini, disebabkan sebagian besar masyarakat Desa Tegalyoso masih tabu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan manakala terjadi atau menyaksikan tindakan KDRT. Menurut Ibu Heny Wijayanti, selaku ibu RW 09, bahwa pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih sangat minim (Wawancara Pribadi, 12 Juli 2026). Karena itu, tindakan KDRT tidak dapat dianggap sebagai persoalan pribadi, tetapi membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama.

Agar masyarakat dapat memahami sebab-sebab KDRT, tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terkait faktor-faktor terjadinya KDRT yang meliputi tekanan ekonomi, norma sosial-budaya, pengalaman kekerasan di masa lalu, pola asuh, serta kondisi psikologis pelaku. Dengan mengenali terlebih dahulu sebab-sebab KDRT, masyarakat desa dapat mencegah dan menemukan solusinya yang tepat.

Namun demikian, bukan berarti persoalan KDRT menjadi persoalan yang terlepas dari tanggung jawab pihak berwenang. Sebaliknya, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan melaporkan kekerasan kepada pihak berwenang. Pencegahan KDRT, juga merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang sehat, saling menghargai, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, serta berani melaporkan dan mendukung korban. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian bersama, diharapkan tercipta keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala, juga mencakup pemahaman mengenai hubungan dan dinamika dalam keluarga, khususnya pentingnya



komunikasi yang efektif antaranggota keluarga. Dalam hal ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pola komunikasi dalam keluarga, termasuk komunikasi antara orang tua dan anak, serta pentingnya komunikasi yang terbuka dan tepat dalam membangun kepercayaan dan hubungan emosional dalam keluarga.

Secara singkat, persoalan komunikasi intrakeluarga turut menjadi perhatian karena perubahan pembagian peran dan pola pengasuhan membutuhkan kesepakatan antaranggota keluarga. Kebiasaan berdiskusi dapat memberi ruang bagi anggota keluarga untuk menyampaikan kebutuhan, pendapat, dan keberatan tanpa harus didominasi oleh satu pihak. Komunikasi yang terbuka juga membantu orang tua memahami kondisi anak dan mengurangi pola hubungan yang hanya bersifat satu arah. Kualitas komunikasi dalam keluarga memiliki hubungan dengan kualitas relasi antara orang tua dan anak serta perkembangan psikososial anak (Hadori, Hastuti, & Puspitawati, 2020).

Sebagai hasil konkret dari sesi ini, kelompok perempuan di Desa Tegalyoso mulai bisa menyusun kesepakatan pembagian tugas domestik yang lebih adil di rumah tangga masing-masing serta menginisiasi pembentukan forum komunikasi warga sebagai ruang deteksi dini guna memitigasi KDRT. Melalui forum ini, peserta tidak hanya berdiskusi, tetapi juga mempraktikkan simulasi cara merespons jika terjadi konflik keluarga, sehingga trauma atau stigma yang sebelumnya menyelimuti korban dapat diminimalisir melalui dukungan komunitas.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini memberikan indikasi awal terhadap perbaikan lingkungan dalam menjalin relasi rumah tangga dan peningkatan kesadaran dalam pembagian peran yang setara. Indikasi ini, dapat dilihat dari langkah pemerintah desa yang mulai membuka lebar terhadap peran perempuan. Menurut, Ibu Cisilia Nygraheni W, selaku Sekretaris Desa (Sekdes), meskipun terdapat hambatan kultural seperti pola patriarki yang masih melekat, namun Pemerintah Desa Tegalyoso sudah membuka lebar terhadap perempuan untuk tampil memimpin atau bersuara di ruang publik maupun organisasi (Wawancara Pribadi, 14 Agustus 2026).

Namun demikian, dampak yang berupa perubahan perilaku keluarga belum dapat dinilai hanya melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sifatnya temporer. Perubahan pola pengasuhan dan cara berkomunikasi yang adaptif dan solutif masih membutuhkan proses yang berlangsung lebih lama. Kegiatan lanjutan berupa pendampingan keluarga, forum diskusi masyarakat, maupun evaluasi pengetahuan peserta dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman yang diberikan mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program sosialisasi dan pendampingan ini masih ditempatkan sebagai tahap awal untuk mendorong terbentuknya keluarga yang lebih setara sekaligus mendukung pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

SIMPULAN

Atas dasar pelaksanaan dan hasil dari kegiatan pengabdian, dapat dikatakan bahwa transformasi menuju Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Tegalyoso tidak bisa terlepas dari kendala struktural dan kultural. Tantangan utama yang dihadapi adalah kuatnya belenggu budaya patriarki yang mengakar di tengah masyarakat. Selain itu, hambatan sosiologis lainnya adalah kuatnya stigma bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan aib keluarga yang tabu untuk dibicarakan di ruang publik. Kondisi ini mengakibatkan korban cenderung bungkam dan siklus kekerasan sulit dihilangkan, karena masyarakat cenderung memilih diam agar tidak dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Untuk mengurai kendala tersebut, solusi penanganan yang diterapkan bertumpu pada pendekatan komunikasi dialogis dan rekontekstualisasi nilai-nilai sosial-budaya dan agama. Melalui ruang-ruang diskusi, masyarakat bisa diajak untuk mempraktikkan prinsip relasi kesalingan di dalam keluarga, di mana beban domestik dan pengasuhan dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban tunggal perempuan. Ruang komunikasi keluarga juga harus didorong agar bebas dari dominasi pihak tertentu, sehingga setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, memiliki ruang yang aman untuk berpendapat. Strategi ini secara perlahan mampu mendekonstruksi pemahaman konservatif dan membuka ruang kesadaran bahwa mencegah kekerasan dan berbagi peran adalah bentuk nyata dari ketahanan keluarga yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Bistara, R. (2020). Dimensi Feminisme dalam Pembaharuan Islam: Menilik Pemikiran Muhammad



- Iqbal. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 30–58. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.118>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, P. P. dan K. B. (DP3AKB) P. J. T. (2025). *Data Kekerasan Perempuan & Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025 September*.
- Ekawati, E. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2024). Dampak Kualitas Implementasi Aparatur Desa Kepundungan Pada Program Desa Ramah Perempuan dan Anak Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 13038–13052. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1>
- Hadori, R., Hastuti, D., & Puspitawati, H. (2020). Self-Esteem Remaja Pada Keluarga Utuh dan Tunggal: Kaitannya dengan Komunikasi dan Kelekatan Orang Tua-Remaja. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(1), 49–60. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.1.49>
- Indonesia, P. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. , Pub. L. No. 23 Tahun 2004 (2004). Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. , Pub. L. No. 7 (2022).
- Lestari, C. I., & Widarini, D. A. (2019). The Power Of Emak-Emak Melawan Hoaks Potensi Perlawanan Hoaks Melalui Pemberdayaan. *Prosiding Comnews 2019*, 141–152. Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara. Diambil dari <https://proceeding.umn.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1089>
- Natarajan, N., Newsham, A., Rigg, J., & Suhardiman, D. (2022). A sustainable livelihoods framework for the 21st century. *World Development*, 155(105898), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105898>
- Perempuan, K. (2026). *Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Tahun 2025*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Putra, I. P. A. P. (2025). Pembangunan Desa berbasis Gender: Analisis Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai Instrumen Pembangunan Berkeadilan di Kota Denpasar. *Jurnal Good Governance Volume 21 No. 1, September 2025*, 21(1), 190–202. <https://doi.org/10.32834/gg.v21i2.945>
- Redaksi Kupipedia. (2026). Sinergi KKN UIN Surakarta Dorong Desa Ramah Perempuan dan Anak di Klaten. Diambil dari KUPI.or.id website: <https://kupi.or.id/artikel/berita/sinergi-kkn-uin-surakarta-dorong-des-ramah-perempuan-dan-anak-di-klaten>
- Tegalyoso, P. D. *Data Masyarakat Pekerja Desa Tegalyoso*. , (2026). Kecamatan Klaten Selatan.
- Tegalyoso, P. D. *Data Pendidikan Masyarakat Desa Tegalyoso*. , (2026). Kecamatan Klaten Selatan.
- Tegalyoso, P. D. *Data Umur Masyarakat Desa Tegalyoso*. , (2026). Kecamatan Klaten Selatan.
- Tim Forum Kajian Ilmiah Fikrah. (2024). *Fikih Perempuan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Kediri: Lirboyo Press.
- Yudho, W., & Tjardasari, H. (2026). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), Article 8. Diambil dari <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol17/iss1/8>